



LKjIP

Tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, Email : kesbangpol_paser@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023.

Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Paser harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Paser melalui seluruh jajaran birokrasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tahun 2023. ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023. . Diharapkan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser di tahun 2023. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Paser.

Tana Paser, 05 Februari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER,**



NONDING, S.Sos., MM.
NIP. 197-10607199703 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Paser, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholders*, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Paser dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022-2026, LKjIP Tahun 2023 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Ada 6 Sasaran strategis yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Tahun 2023 yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel;
2. Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsive dan Bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis;
4. Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas;
5. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi , Sosial Budaya dan Agama;
6. Meningkatkan Kewaspadan dalam menjaga Kondisifitasyang tertib dan Aman

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap sasaran tersebut, terdapat indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Hasil analisis akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator sasaran mencapai kriteria '*Sangat Berhasil*', yaitu sebesar 96,34 %.

Penyerapan anggaran pada Tahun 2023 sebesar 96,34 % dari total anggaran yang dialokasikan. Faktor pendukung keberhasilan sasaran strategis adalah adanya regulasi penyeragaman nomenklatur program / kegiatan dan komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja "Baik".

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS.....	3
D. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN	4
E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	5
F. SARANA DAN PRASARANA	7
G. SARANA DAN PRASARANA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS.....	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	15
C. INSTRUMEN PENDUKUNG.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	23
B. REALISASI ANGGARAN	38
C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA TINDAK LANJUT.....	39
BAB IV P E N U T U P	42

Lampiran :

Lampiran I : Perjanjian Kinerja

Lampiran II : Rencana Aksi

Lampiran III : Hasil Evaluasi Kinerja Triwulan

Lampiran IV :

- Daftar Penghargaan yang diraih
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja
- SK Tim Penyusun laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif perencanaan pembangunan diungkapkan bahwa Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, sehingga diharapkan adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai salah satu upaya pemenuhan tata pemerintahan yang akuntabel maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mengisyaratkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat eselon II, setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerja kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Krja Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun anggaran

2023. Tujuan dari pada penyusunan laporan kinerja ini antara lain adalah :

- a) Mempertanggungjawabkan kinerja organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023;
- b) Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023;

C. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada Bab ini, akan dijelaskan permasalahan dan isu-isu strategis yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Paser. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

- Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan pengamalan nilai Pancasila dan masih rendahnya nilai pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan ormas. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat. Untuk permasalahan dan isu strategis ini merupakan tugas dan fungsi Sekretariat.

Berdasarkan gambaran pelayanan di atas, maka permasalahan-permasalahan pelayanan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan kesadaran politik	1. Masih rendahnya wawasan kebangsaan dan idiologi Negara serta pengamalan nilai Pancasila.	1. Heterogenya masyarakat di Kabupaten Paser sehingga rentan terjadi gesekan sosial di masyarakat baik yang disebabkan olah SARA, Persoalan Ekonomi ataupun persoalan lainnya.
	2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi dan masih rendahnya pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan	1. Belum terbentuknya tim pemantauan perkembangan politik di daerah dalam menciptakan stabilitas politik di daerah secara berkesinambungan

		<p>2. Masih Adanya temuan akuntabilitas terhadap laporan pertanggungjawaban partai politik.</p> <p>3. Kurangnya Pembinaan kelembagaan keormasan terhadap aturan yang berlaku.</p>
	<p>3. Masih belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban dan kewaspadaan masyarakat</p>	<p>1. Belum maksimalnya fungsi kewaspadaan dini di daerah.</p>

D. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Badan Kesatuan bangsa dan Politik adalah unsur Penunjang Urusan Pemerintah Umum Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

1. Kedudukan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2. Tugas

Badan Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan bangsa dan Politik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

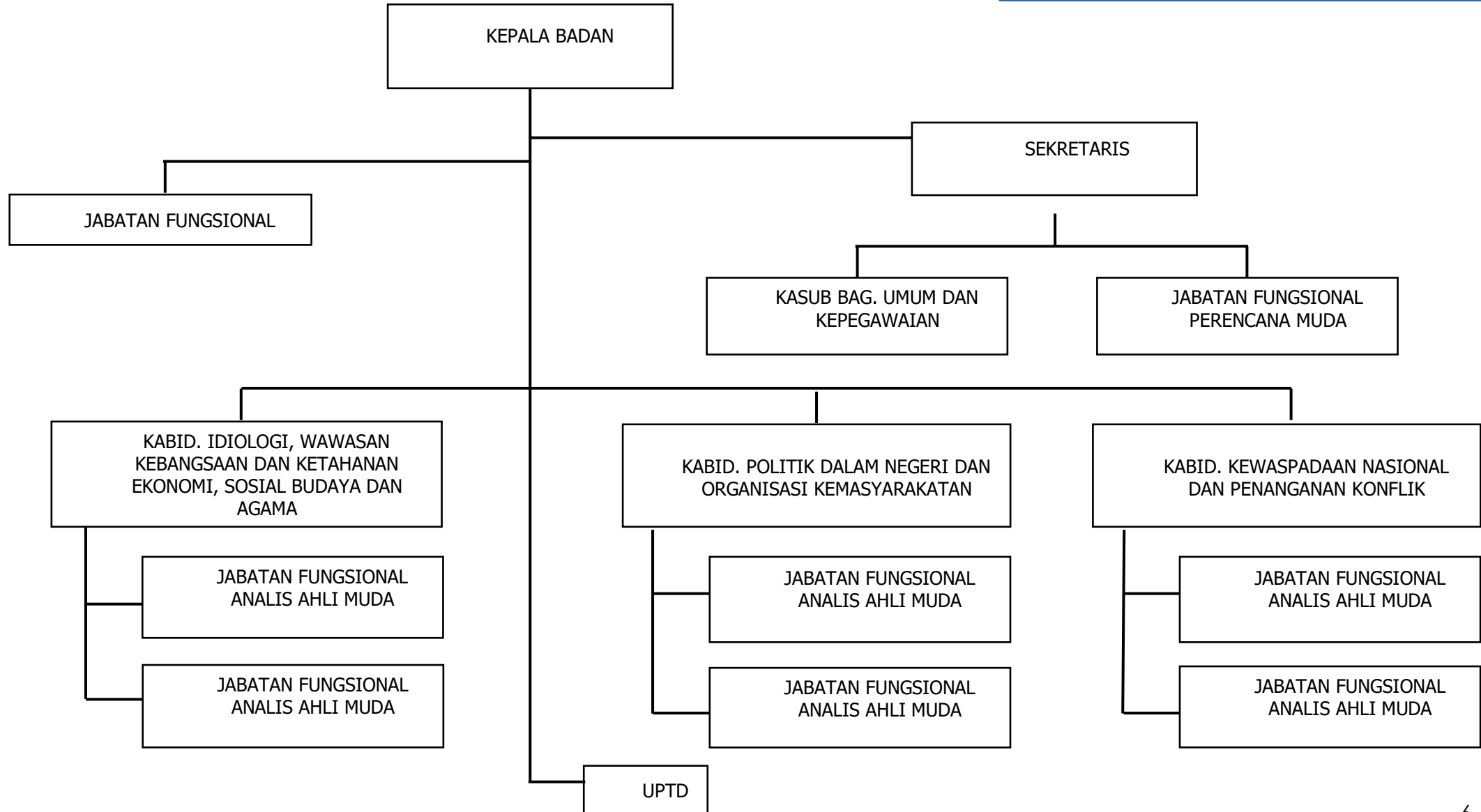
1. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah
 - f. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditetapkan dengan bagan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PASER

Lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser



Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di lingkungan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2023 sebanyak 38 orang, dengan perincian :

Table 1 Susunan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Paser Tahun 2023

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	-	-
2.	Strata 2	4 Org	10,53
3.	Strata 1	21 Org	55,26
4.	Diploma 4	-	-
5.	Diploma 3	1 Org	2,63
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	11 Org	28,95
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Org	2,63
8.	Sekolah Dasar	-	-
	J U M L A H	38	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kab. Paser

F. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai dengan tabel :

Table 2 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI	TAHUN PENGAD AAN	KETERAN GAN
1	Meja Rapat	1	Rusak	2017	
2	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (Aktiv)	4	Rusak	2017	
3	PC. Unit (Acer/Aspire TC-708)	1	Rusak	2017	
4	Kursi Biasa	4	Rusak	2017	
5	Mesin Ketik Manual Standard (Olympia)	2	Rusak	2018	
6	Filling Cabinet Bei (Frontiline)	2	Rusak	2018	
7	Kursi Tamu	2	Rusak	2018	
8	AC Split (Sharp 2 PK)	2	Rusak	2018	
9	AC Split (Sharp 1 PK)	3	Rusak	2018	
10	Gorden/Tirai	4	Rusak	2018	
11	Meja Kerja Pejabat lain lain (Aktiv)	6	Rusak	2018	
12	Kursi Pejabat Lainnya	5	Rusak	2018	
13	Kursi Rapat	21	Rusak	2018	
14	PC Unit (Lenovo)	2	Rusak	2018	
15	PC Unit (HP)	2	Rusak	2018	
16	PC Unit Accer	1	Rusak	2018	
17	Laptop	1	Rusak	2018	
18	Note Book	2	Rusak	2018	
19	Printer (Canon D 2000)	1	Rusak	2018	
20	Printer Epson L 120	2	Rusak	2018	
21	Printer Canon L 310	1	Rusak	2018	
22	Pemasangan AIR PDAM	1	Rusak	2018	
23	Pemasangan LISTRIK	1	Rusak	2018	
24	Kursi Rapat Staff	23	Rusak	2018	
25	Lemari Penyimpanan	5	Rusak	2019	
26	Lemari Kayu	1	Rusak	2019	
27	Kursi Putar	1	Rusak	2019	
28	PC Unit DELL	3	Rusak	2019	
29	Printer Epson L 120	4	Baik	2019	
30	Tempat Parkir	1	Baik	2019	
31	Lemari Besi/Metal	3	Baik	2020	
32	Alat Penyimpanan (Herculas)	5	Baik	2020	
33	Meja Kerja Pejabat	13	Baik	2020	
34	Kursi Kerja	2	Baik	2020	
35	Printer Epson L 120	1	Baik	2020	
36	Printer Canon MP 287	1	Baik	2020	
37	Filling Cabinet Besi	1	Baik	2021	
38	LCD Proyektor/Infocus	1	Baik	2021	
39	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik	2021	
40	PC. Unit	3	Baik	2021	
41	Laptop Asus	1	Baik	2021	
42	Laptop Lenovo	1	Baik	2021	

43	Note Book Lenovo	2	Baik	2021	
44	Note Book Lenovo	2	Baik	2021	
45	Printer Epson L 5190	3	Baik	2021	
46	Lemari Besi/Metal	4	Baik	2022	
47	Filing Kabinet Besi	4	Baik	2022	
48	Kursi Lipat	20	Baik	2022	
49	Lemari ES Sharp/SJ-50Mbxw	1	Baik	2022	
50	Kursi Tamu diruangan Pejabat Ess. III	1	Baik	2022	
51	PC. Unit Lenovo	7	Baik	2022	
52	Laptop MSI/Processor: MSI GF	1	Baik	2022	
53	Laptop Lenovo	1	Baik	2022	
54	Nootebook	2	Baik	2022	
55	Printer Epson L5290	5	Baik	2022	
56	Kursi Lipat	28	Baik	2023	
57	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3	Baik	2023	
58	Laptop	2	Baik	2023	
59	Printer Epson	1	Baik	2023	

Sumber: Rekap aset Badan Kesbangpol Kab. Paser

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematis penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Kata Pengantar

bagian yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi dan berisi hal-hal penting yang ingin disampaikan mengenai akuntabilitas kinerja organisasi

Ikhtisar Eksekutif

menyajikan secara ringkas tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja berdasarkan pengukuran dan analisis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2023

Bab I – Pendahuluan

menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, serta kedudukan, tugas fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser .

Bab II – Perencanaan Kinerja

menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2023 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

menjelaskan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV – Penutup

menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2022–2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Rencana Strategis Badan Kesatuan bangsa dan Poitik Kabupaten Paser merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021 -2026.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser, penyusunan Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Paser mengacu pada RPJMD serta mempunyai kausalitas dengan RPJMD dengan merujuk pada Misi ke-4 dan tujuan ke-1 dan 2 yaitu :

MISI KE - 2	TUJUAN KE – 1 dan Ke-2
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Pemerintahan yang Profesional , Partisipatif dan Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas 2. Mewujudkan Masyarakat yang Memahami dan Menjaga Kesatuan bangsa dan Politik

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam jangka waktu sampai dengan 2026 (tahun ke -5 pelaksanaan Renstra) yang perumusannya didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan berdasarkan visi, misi tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik g dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagaimana tertuang pada Renstra ditetapkan 2 Tujuan dengan 6 sasaran. Berikut disajikan hubungan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik :

Table 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan tangkas	PenilaianMandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			70 %	70 %	73 %	75 %	80 %	85 %	85%
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	CC	B	B	BB	A	A	A
Mewujudkan Masyarakat yang memahami dan Menjaga Kesatuan dan Kesatuan bangsa dan Politik	Mewujudkan Lingkungan Daerah yang Kondusif			76%	76 %	78 %	80 %	85 %	90 %	90%
		Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan .	Persentase Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	0%	50 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Mewujudkan masyarakat Kabupaten paser yang responsif danbertanggung jawab dalam Proses dan partisipasi Politik yang demokratis	Partisipasi Penyelenggaraan Pemilu	75%	75 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80%
		Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Presentase Organisasi masyarakat yang difasilitasi	75%	80 %	80 %	90 %	100%	100%	100%
		Mewujudkan Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya dan Agama	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial Budaya dan Agama	75%	80 %	80 %	90 %	100%	100%	100%
		Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman	Terwujudnya ketahanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Table 4 Matriks hubungan tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022 - 2026

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat daerah yang Optimal / Responsif dan Tangkas

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Membina dan meningkatkan Peran serta Aparatur sehingga mencapai pola kerja yang baik menuju Good governance	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Tujuan 2 : Mewujudkan masyarakat yang memahami dan menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Program penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
2. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang responsif dan Bertanggung Jawab dalam proses dan Partisipasi Politik yang demokratis.	Membina dan Meningkatkan Pemahaman Politik masyarakat sehingga meningkatkan Peran serta Masyarakat dalam Pemilu	Program Peningkatan Peran partai Politik dan lembaga pendidikan Politik melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Mewujudkan Pembinaan dan pemberdayaan Ormas	Membina dan Memberdayakan Ormas	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan
4. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi.Sosial Budaya dan Agama	1. Penguatan Kesadaran Aparatur negara dan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara 2. Peningkatan Peran Tokoh Masyarakat . Tokoh Agama. Tokoh Pemuda . Tokoh perempuan . Tokoh Adat dalam penanganan Pencegahan dan penanggulangan Narkoba.	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.Sosial Budaya dan Agama
5. Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang terib dan Aman	1. Peningkatan deteksi Dini dan Cegah dini terhadap Ancaman Stabilitas Daerah.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

	2. Peningkatan Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan daerah	
--	---	--

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 yang telah disusun, maka Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser telah menyusun rincian Program dan Kegiatan Pada Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

Table 5 Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan
1	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik . Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik , Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik.
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
6.	Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganam Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja beserta targetnya yang dijabarkan per tahun. Penetapan indikator kinerja sasaran strategis tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis-dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Continuously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi). Indikator Kinerja tersebut seluruhnya bersifat outcome yang sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal. Demikian pula dengan target yang ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan bersama dengan seluruh Bidang pengampu melalui Rapat.

Dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategisnya. Penetapan IKU yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2022-2026. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang akan digunakan dengan target kinerja yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan kesatuan bangsa dan Politik Tahun 2023 turunan dari IKU yang merupakan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III sampai IV tersaji dalam lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja ini.

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Adapun formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama secara terperinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Table 6 Indikator Kinerja Utama BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat Definisi Operasional : Nilai Sakip merupakan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal		SEKRETARIAT
2	Meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	Jumlah terlaksananya peningkatan <u>kesadaran masyarakat ttg Ideologi Pancasila</u> x 100 Jumlah Sosialisasi tahun (n) Definisi Operasional : Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila perlu dilakukan Guna Peningkatan Nilai Moral warga Negara Indonesia. Upaya menjaga dan menguatkan Nilai - Nilai Pancasila dimasa sekarang dimasyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal yaitu Pendekatan Budaya, Internalisasi disemua level Pendidikan dan Penegakan hukum		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			terhadap hal - hal yang tidak sejalan dengan nilai – nilai pancasila		
3	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan Bertanggung Jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	$\frac{\text{Jumlah yang Mengikuti Partisipasi politik}}{\text{Jumlah partisipasi Politik}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Tujuan Penyelenggaran Pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat dan hak azasi warga Negara. Untuk mejamin Penyelenggaran Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan aman diperlukan Upaya / Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu.</p>		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
4	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	$\frac{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Masih Aktif}}{\text{Jumlah Organsisasi Kemasyarakatan Yang terdaftar}} \times 100\%$ <p>Defimisi Operasional : Tumbuhnya Organisasi Kemasyarakatan secara masif dengan beragam platfrom yang sering kali menimbulkan gesekan -</p>		BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			gesekan dimasyarakat mengharuskan pemerintah untuk mengawal kemerdekaan berserikat / berkumpul tersebut . Tantangan terbesar dalam mengelola Organisasi Masyarakat adalah mengarahkan Keberadannya agar bermanfaat bagi masyarakat , bangsa dan Negara.		
5	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	<p>Jumlah terlaksananya peningkatan wawasan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama tahun (n)</p> $\frac{\text{Jumlah sosialisasi tahun (n)}}{\text{Jumlah sosialisasi tahun (n)}} \times 100\%$ <p>Definisi Operasional : Dalam rangka mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pemerintah perlu menetapkan Kebijakan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya guna menghindari Permasalahan yang timbul dimasyarakat . Salah satu Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan</p>		BIDANG IDEOLOGI , WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman	Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang terselsaikan}}{\text{Jumlah Konflik Sosial yang ada}} \times 100\%$ <p>Defimisi Operasional : Untuk mewujudkan Stabiilitas Keamanan dan Ketertiban dikabupaten Paser perlu dilakukan Upaya Pencegahan antara lain melakukan Pembinaan antar suku dan Intra suku , Umat beragama , Ras, dan Golongan lainnya serta meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanganan sebelum, saat dan pasca konflik guna mewujudkan stabilitas keamanan Daerah</p>		BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Badan Kesatuan bangsa Kabupaten Paser mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp. 32.654.909.391,00 yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
A.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.426.345.746,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.300.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.899.531.510,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.117.300,00
4	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.713.900
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.663.036,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.020.000,00
B	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.980.439.500,00
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan c	1.980.439.500,00
C	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	20.333.317.095,00
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan mum kepala daerah serta pemantauan.	20.333.317.095,00
D	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	302.487.250,00
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	302.487.250,00
E	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, SosialBudaya dan Agama	963.320.800,00
1.	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi . Sosial Budayadan Agama.	963.320.800,00
F	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.648.999.000,00
1.	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial .	2.648.999.000,00
	TOTAL	32.654.909.391,00

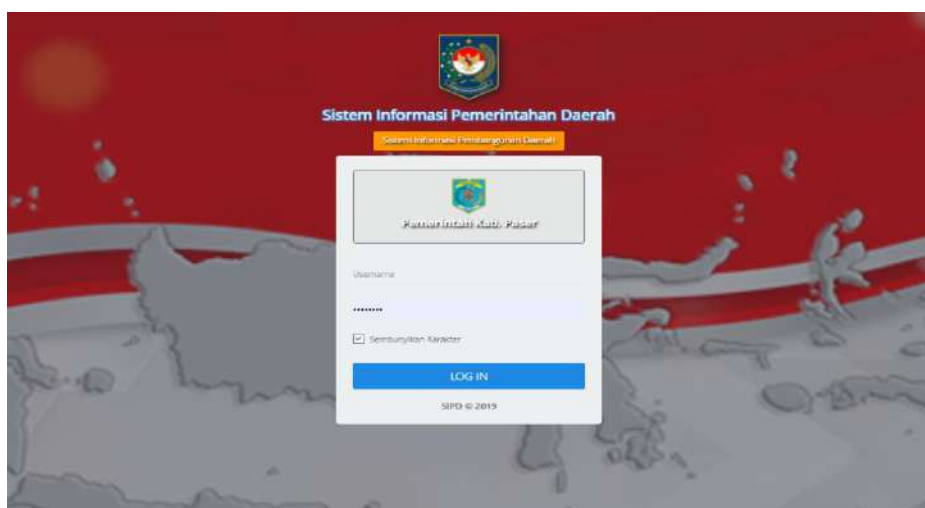
Rincian Anggaran per kegiatan disajikan dalam Lampiran-2.

Jumlah anggaran tersebut selanjutnya digunakan untuk mendukung terwujudnya 6 sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2023.

C. INSTRUMEN PENDUKUNG

Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser melalui sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Paser. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi, sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, salah satu Aplikasi yang selalu digunakan adalah Aplikasi Perencanaan yang dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (**SIPD**) **Kemendagri** dengan alamat web address <https://pasirkab.sipd.kemendagri.go.id/> yang dimulai akhir Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Paser mempersiapkan implementasi SIPD Keuda sehingga sistem perencanaan bisa terintegrasi dengan sistem penganggaran.



Gambar 1 Aplikasi SIPD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2023 yang ditargetkan untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser tahun 2023.

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis adalah dengan indikator kinerja. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser, pencapaian IKU Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023 ini akan dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Table 7 Pengukuran IKU Badan Kesbangpol Kab. Paser Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA		TARGET TAHUN 2023	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya Pengelola Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel	Nilai Sakip dan AKIP	Cukup Jelas	X 100	73 %	65.22	89,34

<i>Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</i>	Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	Jumlah terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila dibagi Jumlah Sosialisasi Tahun (n)	x 100	100%	100 %	100	
<i>Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Yang Responsif dan Bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis</i>	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah yang mengikuti Partisipasi Politik dibagi Jumlah Partisipasi Politik	X 100	80%	100	125	
<i>Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas</i>	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	Jumlah Ormas yg masih aktif dibagi Jumlah Ormas yang terdaftar	X 100	80%	100	125	
<i>Mewujudkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	Persentase Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah terlaksananya Peningkatan Wawasan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama Tahun n dibagi Jumlah Sosialisasi tahun n	X 100	80%	80 %	100	
<i>Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondisifitas yang tertib dan Aman</i>	Persentase Kasus Konflik yang terselesaikan	Jumlah Konflik Sosial yang terselesaikan dibagi iJumlah Konflik yang ada	x 100	100%	100 %	100	
RATA-RATA CAPAIAN							98,18

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 sebanyak 6 indikator dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- ◆ Memuaskan (capaian diatas 90%-100%) sebanyak 6 indikator

Dari pengukuran IKU diatas, menunjukkan kinerja pencapaian sasaran strategis memenuhi target dengan kriteria sangat berhasil. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis dibawah ini

Table 8 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	B (70)	65,22%	89,34%
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	72%	72 %	100%
Rata-rata Capaian				189,34 %

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan

Tahun 2023

Indikator Kinerja		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	70	59,97-	73	65,22
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	70	70	72	72

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Nilai Evaluasi Sakip dan AKIP	89,34	82%
2	Indeks Kepuasan Sekretariat	72 %	80%

Target meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel dengan Realisasi capaian Kinerja 89,34 % , Indikator Kinerjanya adalah Nilai Evaluasi Sakip dan Akip dari Inspektorat dan realiasinya adalah B (65, 22) serta Inderks Kepuasan Layanan Sekretariat yang mencapai 100 % .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Sakip dan Akipn yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini dikarenakan kerjasama yang baik serta terbangunnya sinergitas bersama unsur *stakeholders* terkait.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 melebihi Target Renstra 2026. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2023, khususnya sejumlah indikator kinerja yang telah mencapai target jangka menengah, memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas

adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah Kantrantibmas, pelayanan terhadap tertib administrasi bagi ormas dan partai politik penerima bantuan keuangan serta menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan terhadap masyarakat dengan tetap membina sinergitas diantara stakeholder dapat meningkatkan capaian kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dapat terwujud.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terealisasi 10 Dokumen,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi untuk 35 Orang/ Bulan selama 1Tahun Kegiatan dan Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang terealisasi 230 Dokumen,
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebanyak 1 Paket, .Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terealisasi 1 Paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 3 Paket, Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi 2 Paket , Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan terealisasi 12 Dokumen, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terealisasi sebanyak 120 Laporan.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah antara lain : Pengadaan Mebel yang terealisasi sebanyak 2 Unit.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah antara lain: Penyediaan jasa Surat menyurat yang terealisasi selama 1 Tahun Kegiatan , Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi selama 12 Laporan Kegiatan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah antara lain Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terealisasi sebanyak 3 Unit Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terealisasi sebanyak 10 Unit

**Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.426.345.746	5.911.790.846	91,99
1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.300.000	43.053.300	97,19
2	Administrasi Keuangan daerah	5.899.531.510	5.398.527.776	91,51
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.117.300	414.118.590	99,28
4	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.713.900	19.703.600	99,95
5	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah	23.663.036	17.312.180	73,16
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.020.000	19.075.400	86,63

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 91,99% dari 6 (Enam) kegiatan, maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 514.554.900,- atau 18,10 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran 1 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang Akuntabel tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Sekretariat sebanyak 13 (Tiga Belas) orang sebagai berikut :

1. Kepala Badan : 1 orang
2. Sekretaris Badan : 1 orang
3. Kasubbab Umum dan Kepegawaian : 1 orang
4. JF. Perencana Ahli Muda : 1 orang
5. Bendahara Pengeluaran : 1 orang
6. Analis Pengembangan SDM Aparatur : 1 orang
7. Penyusu Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perrengkapan : 1 orang
8. Pengelola Gaji : 1 orang
9. Pengelola Sarana dan Prasarana : 1 orang
10. Pengadministrasi Umum : 1 orang
11. Pelaksana Pengelola Data : 1 orang
12. Pengelola Pengadministrasi Umum : 1 orang
13. Pramu Kebersihan : 1 orang

Table 9 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 2 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	80	80	100
Rata-rata Capaian				100

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	80	80	100	100

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang Ideologi Pancasila	100	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 2 Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan meningkat dari capaian kinerja tahun sebelumnya dimana capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar yaitu 100%

Target meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Tahun 2023 dengan Target 80 % , dan terrealisasi 80% , Indikator Kinerjanya adalah Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila sehingga Nilai Capaian Kinerja adalah 100 % .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Ideologi Pancasila yang tercapai sesuai tabel diatas capaiannya 100% hal ini diperoleh dari tidak ada kejadian kasus makar ataupun hal-hal yang mengganggu kehidupan beragama masyarakat di Kabupaten paser sehingga rasa nasionalisme dan Cinta Tanah Air dan bangsa antar Masyarakat tetap terjaga dan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan langkah aparat keamanan yang sangat intens dan sigap dan melakukan tindakan tegas terhadap Oknum yang melakukan tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik

Indonesia serta peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kenyamanan hidup dilingkungan masyarakat menjadi penting dengan dukungan koordinasi yang sangat intensif antar FKUB, pemerintah dan *stakeholder* terkait.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan Target Renstra 2026. telah mencapai target Renstra. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina diantara umat beragama dalam bingkai NKRI serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam menangkal bahaya paham radikalisme dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya semakin meningkatkan rasa Cinta Tanah Air dan Bangsa adalah 100%. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah dilakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah semakin berperannya masyarakat dalam membantu dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan harmonisasi hidup bermasyarakat serta semakin meningkatnya kesadaran Cinta Tanah Air dan Bangsa serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Paser

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari Sub. Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terealisasi 4 Dokumen
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang terealisasi 100 Orang

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.980.439.500	1.971.864.480	99,57
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	1.980.439.500	1.971.864.480	99,57

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 99,57% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.575.020,- atau 0,06% Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatun Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
3. Analis Bina Kehidupan Agama : 1 orang
4. Analis Wawasan Kebangsaan : 1 orang
5. Analis Perekonoian : 1 orang
6. Pengelola Data : 1 orang
7. Pelaksana Pengadministrasian Umum : 2 orang

Table 10 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 3 Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
2023**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	80	100	125
Rata-rata Capaian				125

**Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022
dengan Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	68,54	90.18	100	125

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	100	80%

Target Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung Jawab dalam Proses dan Partisipasi Politik yang Demokratis untuk Tahun 2023 dengan Target 80 % , dan terrealisasi 100% , Indikator Kinerjanya adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu sehingga Nilai Capaian Kinerja adalah 125 % .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu yang tercapai sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2023 100% hal ini diperoleh Karena seluruh Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu terlaksana.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 realiasinyan telah melebihi Target Renstra 2026.. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina dalam bingkai NKRI serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder*. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran serta aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah Kantrantibmas, pelayanan terhadap tertib administrasi partai politik penerima bantuan keuangan, terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Peran Parta Politik , Etika Budaya Politik ,Peningkatan Demokrasi serta semakin meningkatnya kesadaran serta rasa tanggungjawab dalam menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat di Kabupaten Paser.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala daerah serta pemantauan situasi Politik didaerah terdiri dari Sub. Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik , Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik , Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah ,serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan teralisasi 1000 Orang.
- b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik , Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah ,serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan teralisasi 50 Orang.
- c. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik , Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Polirtik , Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah ,serta pemantauan situasi Politik di Daerah dengan teralisasi 2 Laporan

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	20.333.317.095	19.996.788.194	98,34
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik ,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum kepala daerah serta pemantauan situasi Politik didaerah	20.333.317.095	19.996.788.194	98,34

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 98,34% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.336.528.901,- atau 61,23 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
3. Analis Poldagri : 1 orang
4. Pengelola Data Poldagri : 1 orang
5. Pengelola Data Ormasy : 1 orang
6. Pelaksana Pengelola Data : 3 orang

Table 11 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 4 Mewujudkan Pembinaan dan Perberdayaan Organisasi Masyarakat

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun

2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormasi	80	100	125
Rata-rata Capaian				125

**Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022
dengan Tahun 2023**

Indikator Kinerja		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	9,89	13,18	100	125

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Persentase Jumlah Fasilitasi Ormas	100	100%

Target Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk Tahun 2023 dengan Target 80 % , dan terrealisasi 100% , Indikator Kinerjanya adalah Presentase Jumlah Fasilitasi Ormas sehingga Nilai Capaian Kinerja adalah 125 % .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Ormas yang tercapai sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2023 100% hal ini diperoleh Karena seluruh Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Presentase Jumlah Fasilitasi Ormas terlaksana dengan Baik dengan bukti semakin banyaknya Organisasi Kemasyarakatan yang melaporkan Keberadaannya dan Aktif melaporkan Kegiatan yang dilaksanakan dikabupaten paser ini.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 realiasi Capainyan Kinerjanya telah melebihi Target Renstra 2026. Hal ini membuktikan hubungan harmonis yang terjalin didasari dengan semangat persatuan dan kesatuan yang terbina terhadap Organisasi Kemasyarakatan serta Kegiatan Pengawasan Ormas serta semakin berperannya masyarakat dan seluruh *stakeholder*. Namun demikian dengan memperhatikan perkembangan dinamika masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser perlu merumuskan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran selain kegiatan yang selama ini telah di lakukan, agar optimisme pencapaian indikator kinerja jangka menengah tersebut dapat diwujudkan.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah – masalah yang timbul mengenai Pemberdayaan Oganisasi Kemasyarkatan, OKP, LSM, Yayasan dan Paguyuban serta Pengawasan Ormas yang ada diKabupaten paser

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan terdiri Sub. Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Orang Asing didaerah dengan terrealisasi 200 Orang
- b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Orang Asing didaerah dengan terrealisasi 300 Orang
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Orang Asing didaerah dengan terrealisasi 2 Laporan

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Keasyarakatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasya- rakatan	302.487.250	295.620.645	97,73
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi Kemasyarakatan	302.487.250	295.620.645	97,73

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 97,73% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.6.866.605,- atau 0,91 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------|
| 1. Kepala Bidang | : | 1 orang |
| 2. JF. Kebijakan Ahli Muda | : | 1 Orang |
| 3. Analis Poldagri | : | 1 orang |
| 4. Pengelola Data Poldagri | : | 1 orang |
| 5. Pengelola Data Ormasy | : | 1 orang |
| 6. Pelaksana Pengelola Data | : | 3 orang |

Table 9 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 5 Mewujudkan ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

**Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun
2023**

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang ditindak Lanjuti	100	100	100
Rata-rata Capaian				100

**Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022
dengan Tahun 2023**

Indikator Kinerja		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang ditindak Lanjuti s	50	62,50	100	100

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Persentase Kebijakan bidang Katahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang ditindak Lanjuti	100	100%

Target persentase Kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi , Soial Budaya dan Agama untuk Tahun 2023 adalah 100% realisasi yang dicapai adalah 100% sehingga capaian kinerja adalah 100%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Indikator Kinerja persentase Kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial, Budaya dan Agama sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2023 100% hal ini diperoleh Karena seluruh Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kab. Paser.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 bahkan ada yang telah sesuai dengan target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 2023 memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya kapasitas dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama , hal ini disebabkan karena terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan kantrantibmas dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.,

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang terdiri dari Sub. Kegiatan :

- a. Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi PencegahannPenyalah Gunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umam Bergaman dan Penghayat Kepercayaan Didaerah dengan realisasi sebanyak 5 Dokumen
- b. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahannPenyalah Gunaan Narkotika ,Fasilitasi Kerukunan Umam Bergaman dan Penghayat Kepercayaan Didaerah dengan realisasi sebanyak 1000 orang
- c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahann Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umam Bergaman dan Penghayat Kepercayaan Didaerah dengan realisasi sebanyak 10 Laporan.

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pembinaan dan Pengem - bangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	963.320.800	959.293.860	99,58
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi . Sosial Budaya dan Agama.	963.320.800	959.293.860	99,58

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 99,58% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.026.940,- atau 2,94% Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatun Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

❖ **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM**

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Ideologi,Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 8 (Delapan) orang sebagai berikut :

1. Kepala Bidang : 1 orang
2. JF. Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang
3. Analis Bina Kehidupan Agama : 1 orang

- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---------|
| 4. | Analisis Wawasan Kebangsaan | : | 1 orang |
| 5. | Analisis Perekonomian | : | 1 orang |
| 6. | Pengelola Data | : | 1 orang |
| 7. | Pelaksana Pengadministrasian Umum | : | 2 orang |

Table 13 : Analisis Perbandingan dan Pencapaian Sasaran 6 Meningkatkan Kewaspadaan dalam menjaga Kondusifitas yang tertib dan Aman

Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	100
Rata-rata Capaian				100

Perbandingan Capaian Kinerja antara Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		
	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	64,77	80	100	100

Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2026

Indikator Kinerja		Realisasi 2023	Target 2026
1	Persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100%

Target persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan untuk Tahun 2023 secara umum kondisi daerah Kabupaten Paser aman dan kondusif tidak ada hal-hal yang menonjol yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dikarenakan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kantrantibmas. Sehingga realisasi capaian Kinerja 100% yang diperoleh pada tahun 2023 didapat dari data tidak adanya tindak kriminalitas yang mengganggu stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat yang terjadi selama tahun berjalan.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 untuk Indikator Kinerja persentase Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan sesuai tabel diatas capaian Kinerjanya di Tahun 2023

100% hal ini diperoleh Karena seluruh Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja Badan Kesbangpol Kab. Paser.

Dari tabel Renstra tersebut diatas dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja pada tahun 2023 sesuai dengan target Renstra. Memperhatikan pencapaian sampai dengan tahun 20213 dalam hal menurunnya tindak kriminalitas dimasyarakat memberi keyakinan bahwa target indikator kinerja jangka menengah tahun 2026 akan dapat dicapai.

Adapun faktor keberhasilan dari indikator diatas adalah makin meningkatnya Motivasi Kerja yang tinggi , kapasitas dan peran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat dalam mengantisipasi masalah-masalah kantrantibmas, hal ini disebabkan karena terkoordinasinya penanganan masalah Konflik Sosial yang dapat menimbulkan gangguan kantrantibmas dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya target yaitu sebagai berikut :

Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari Sub. Kegiatan :

- .a. Penyusunan Program Kerja dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang , serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terrealisasi sebanyak 2 Dokumen
- .b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang , serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terrealisasi sebanyak 2 Dokumen
- .c. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang , serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terrealisasi sebanyak 100 Orang
- .d. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang , serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terrealisasi sebanyak 1008 Orang
- .e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang , serta Penanganan Konflik didaerah. Yang terrealisasi sebanyak 144 Laporan
- .f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

Realisasi Anggaran Program /Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program Peningkatan Kewaspadaan dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.648.999.000	2.322.967.407	87,69
1	Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial .	2.648.999.000	2.322.967.407	87,69

Data realisasi anggaran diatas jika dibandingkan dengan Jumlah Anggaran yang Disediakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Kesbangpol mencapai rata-rata 87,69% dari 1 (satu) kegiatan maka dapat disimpulkan Badan Kesbangpol Kab. Paser telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 326.031.593,- atau 7,11 % Dari total anggaran Pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupa ten Paser .

❖ Analisis Atas Efisiensi Penggunaan SDM

Pegawai yang terlibat dalam menangani sasaran Strategi tersebut yaitu terdiri dari PNS dalam Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Bidang Kewaspadaan Nasional Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebanyak 9 (Sembilan) orang sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Kepala Bidang | : 1 Orang |
| 2. JF. Kebijakan Ahli Muda | : 2 Orang |
| 3. Analis Data Intelejen | : 1 Orang |
| 4. Pengadministrasian Umum | : 1 Orang |
| 5. Pengelola Data | : 2 orang |
| 6. Pelaksana Pengelola Data | : 1 Orang |
| 7. Pelaksana Pengadministrasian Umum | : 1 Orang |
| 8. | |

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2023 belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, Alokasi dan realisasi kinerja keuangan Tahun 2023 sebesar 96,34 % di uraikan sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Belanja (Rp).	Realisasi Belanja (Rp).	Capaian (%)
BELANJA	32.654.919.391	31.458.315.432	96,34
BELANJA OPERASI	32.567.901.791	31.371.307.832	96,33
Belanja Pegawai	5.515.255.369	5.014.692.992	90,92

Belanja Barang dan Jasa	7.298.986.827	6.928.744.921	94,93
Belanja Hibah	19.753.659.595	19.427.869.919	98,35
BELANJA MODAL	87.007.600	87.007.600	100
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.007.600	87.007.600	100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-		

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang didukungnya tersaji secara rinci pada lampiran 3:

**Table 14 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sampai Dengan Tahun 2023**

NO.	Tahun	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Keuangan (%)
1.	2019	98,00	98,00
2.	2020	86,00	86,00
3.	2021	80,16	80,16
4.	2022	95,43	95,43
5.	2023	96,34	96,34
Rata-rata		95,93	95,93

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser mengalami peningkatan jika dibanding dengan pencapaian pada tahun sebelumnya, tercatat capaian kinerja naik sebesar 38,91% dari tahun 2022,

C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN SERTA TINDAK LANJUT

- Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Paser adalah :
- Penetapan IKU dan Target indikator belum sepenuhnya didukung dengan formulasi dan mekanisme pengumpulan/pengukuran data kinerja yang memadai. Reviu terhadap indikator kinerja dan target kinerja tidak secara rutin dilakukan, akibat koordinasi yang masih belum optimal, proses revisi/reviu dokumen perencanaan belum terarah, pengendalian dan evaluasi belum berjalan seperti harapan.
- Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (*cascading*) sampai ke level terendah.
- Regulasi penyeragaman nomenklatur program/kegiatan ditetapkan di akhir masa Renstra (Permendagri nomor 90 tahun 2019).
- Komitmen seluruh personil untuk meningkatkan kinerja "Baik".

- Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 6 program dan 11 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.426.345.764,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp.5.911.790.846,00 (91,99%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penguangan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang terealisasi 10 Dokumen,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi untuk 35 Orang/ Bulan selama 1 Tahun Kegiatan dan Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD yang terealisasi 230 Dokumen,
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah antara lain : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebanyak 1 Paket, .Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor terealisasi 1 Paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi 3 Paket, Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan yang terealisasi 2 Paket , Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan terealisasi 12 Dokumen, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terealisasi sebanyak 120 Laporan.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah antara lain : Pengadaan Mebel yang terealisasi sebanyak 2 Unit.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah antara lain: Penyediaan jasa Surat menyurat yang terealisasi selama 1 Tahun Kegiatan , Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang terealisasi selama 12 Laporan Kegiatan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah antara lain Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terealisasi sebanyak 3 Unit Kendaraan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang terealisasi sebanyak 10 Unit

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.980.439.500,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 1.971.864.480,00 (99,57%) yang

diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terealisasi untuk 100 Orang dan 4 Dokumen

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.333.317.095,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp19.996.788.194,00 (98,34 %) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan yang terealisasi untuk 1.050 Orang dan 10 Parpol dan 2 Laporan

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.302.487.250,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 295.620.645,00 (97,73%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat yang terealisasi untuk 2 Laporan dan 500 Orang.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.963.320.800,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 959.293.820,00 (99,58%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang terealisasi untuk 5 Dokumen, 10 Laporan dan 1.000 Orang.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.648.999.000,00 dan realisasi anggaran mencapai Rp 2.322.957.407,00 (87,69%) yang diarahkan penggunaannya untuk Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terealisasi untuk 144 Laporan 24 Dokumen, 1.108 Orang.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2022, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Bappedalitbang merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan dari Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Tahun 2023. Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu indikator sasaran strategis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser ***Sangat Berhasil***, yaitu sebesar .% dengan realisasi anggaran sebesar 96,34%

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Namun juga diidentifikasi hambatan eksternal yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser (*uncontrolled*) cukup mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser. Keberhasilan yang telah dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan dan terus diupayakan guna memacu kinerja instansi. Peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser dapat terwujud.

Akhirnya, besar harapan dengan adanya Laporan Kinerja ini, setiap anggota organisasi dapat termotivasi untuk memacu pelaksanaan tugasnya masing-masing dengan menata kembali seluruh sumber daya yang dimiliki yang berada dalam tanggung jawabnya sehingga secara nyata dapat berguna bagi perbaikan kinerja organisasi.

Lampiran I



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NONDING, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **dr. FAHMI FADLI**
Jabatan : Bupati Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NONDING, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP dan APIP	BB
2	Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Idiologi Pancasila	100 %
3	Mewujudkan masyarakat kabupaten paser yang responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu	80 %
4.	Mewujudkan pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas)	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	90 %
5.	Mewujudkan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama.	Fasilitasi kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	90 %
6	Meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman.	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 7.112.162.360
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Rp. 1.355.982.300
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.	Rp. 33.831.271.197
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.	Rp. 908.741.292
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Rp. 259.000.000
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	Rp. 1.764.814.380
		Rp. 45.267.771.529

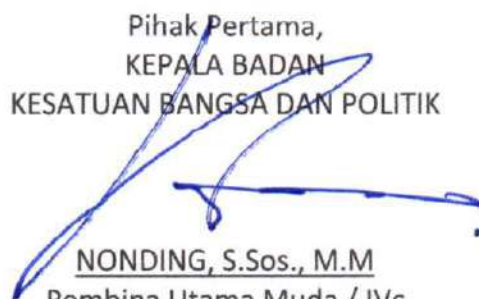
Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NONDING, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. HATIMAH, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

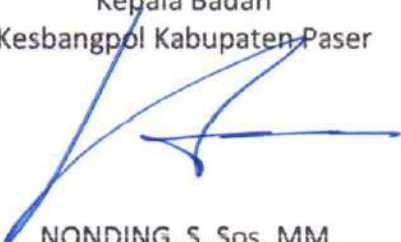
Nama : **NONDING, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung *pihak pertama*,
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007


Pihak Pertama,
Sekretaris
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2001


NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 89.300.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 6.163.535.004
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 793.930.420
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 19.713.900
5.	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 23.663.036
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 22.020.000
	Jumlah	Rp. 7.112.162.360

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007

Pihak Pertama,
Sekretaris
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %
2.	Meningkatnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %
3.	Meningkatnya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %
4.	Terpenuhinya barang milik daerah	Tersedianya barang milik daerah	2 Unit
5.	Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
6.	Meningkatnya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	100 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HANIK YANUATI, SP**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. HATIMAH, S.Sos, M.SI**

Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten Paser


Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2 001

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesbangpol Kab. Paser


HANIK YANUATI, SP
Penata Tk I / IIIId
NIP. 19690111 199308 2005

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp. 700.800
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 122952.700
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 46.259.200
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Rp. 35.059.800
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 5.200.000
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 583.757.920
7.	Pengadaan mebel	Rp. 19.713.900
8.	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp. 6.429.800
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp. 17.233.236
10.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Rp. 17.760.000
11.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 4.260.000
	TOTAL	Rp. 793.930.420

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten Paser



Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2 001

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesbangpol Kab. Paser



HANIK YANUATI, SP
Penata Tk I / III d
NIP. 19690111 199308 2005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1 Paket
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	2 Paket
3.	Tersedianya bahan logistic kantor yang tersedia	Jumlah paket bahan logistic kantor yang tersedia	2 Paket
4.	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah paket bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Paket
5.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Dokumen
6.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Laporan
7.	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Unit
8.	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	12 Laporan
9.	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia.	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia.	12 Bulan
10.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit
11.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. HAINUN. A, SE**
Jabatan : JF Perencana Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **Hj. HATIMAH, S.Sos, M.SI**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten Paser

Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2 001

Pihak Pertama,
JF Perencana Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kab. Paser

Hj. Hainun, A. SE
Penata Tk I / III d
NIP. 19760712 199603 2 004

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 29.300.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp. 15.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 45.000.000
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.715.184.416
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 448.350.588
	TOTAL	Rp. 6.252.835.004

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Badan Kesbangpol
Kabupaten Paser



Hj. Hatimah, S. Sos, M.Si
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19681224 199002 2 001

Pihak Pertama,
JF Perencana Muda
Badan Kesbangpol Kab. Paser



Hj. Hainun, A. SE
Penata Tk I / III d
NIP. 19760712 199603 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen
2.	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen
3	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen
4.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 Orang / Tahun
5.	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	250 Dokumen



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIAH MUSTIKA SARI, ST,MM**

Jabatan : Kabid. Ideologi ,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi,
Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **NONDING S.Sos., MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

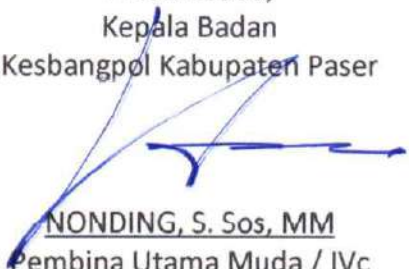
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 199703 1 007

Pihak Pertama,
Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


DIAH MUSTIKA SARI,ST,MM
Pembina / IVa
NIP. 19780929 200804 2001

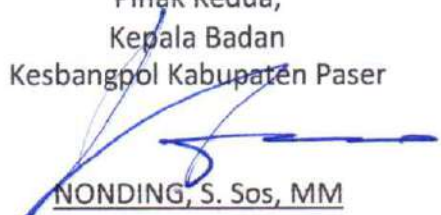
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemahaman ideology pancasila dan karakter kebangsaan	Terlaksananya perumusan teknis dibidang ideology pancasila dan karakter kebangsaan	100 %
2.	Meningkatnya pemahaman tentang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama	Terlaksananya perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	100 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.1. 355.982.300
2.	Prumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi , Sosial dan Budaya	Rp. 295.000.000
	Total	Rp. 1.650.982.300

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607117031007

Pihak Pertama,
Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


DIAH MUSTIKA SARI, ST, MM
Pembina / IVa
NIP. 19780929 200804 2001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HARDIANSYAH, S.Sos**
Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **DIAH MUSTIKA SARI,ST,MM**
Jabatan : Kabid. Ideologi ,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya
dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

DIAH MUSTIKA SARI,ST,MM
Pembina / IVa
NIP. 19780929 200804 2001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Hardiansyah, S. Sos
Penata / IIIc
NIP. 19860103 201001 1 015


NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Rp. 80.000.000
2.	Pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Rp. 200.000.000
3	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Rp. 15.000.000
	Total	Rp. 295.000.000

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


DIAH MUSTIKA SARI, ST, MM
Pembina / IVa
NIP. 19780929 200804 2001


Hardiansyah, S. Sos
Penata / III d
NIP. 19860103 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah dokumen program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	5 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	120 orang
2.	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah.	4 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARDIANSYAH, S.Sos**
Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **DIAH MUSTIKA SARI,ST,MM**
Jabatan : Kabid. Ideologi ,Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


DIAH MUSTIKA SARI,ST,MM
Pembina / IVa
NIP. 19780929 200804 2001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Hardiansyah, S. Sos
Penata / III d
NIP. 19860103 201001 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Peserta Pelatihan bela Negara dan Pembentukan Gugus Tugas Kecamatan dan terlaksananya Upacara Peringatan hari Besar	2 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	Jumlah Anggota FPK yang orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.	90 Orang

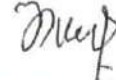
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan.	Rp. 60.000.000
2.	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan.	Rp.1.295.982.300
	Total	Rp. 1.355. 982.300

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
 Kabid. Ideologi Wawasan Kebangsaan dan
 Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama
 Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


DIAH MUSTIKA SARI, ST, MM
 Pembina / IVa
 NIP. 19780929 200804 2001

Pihak Pertama,
 JF Analis Kebijakan Muda
 Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Hardiansyah, S. Sos
 Penata / III d
 NIP. 19860103 201001 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ACHMAD HARTONO. S.Sos., M.Si**

Jabatan : Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **NONDING S.Sos., MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

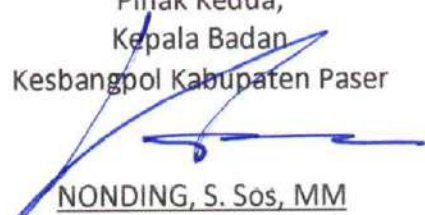
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

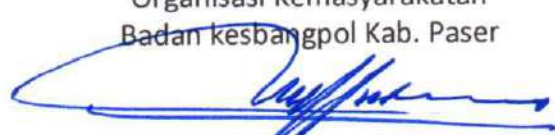
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607117031007

Pihak Pertama,
Kabid Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan kesbangpol Kab. Paser


H. Achmad Hartono, S. Sos, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19701012 199803 1 008

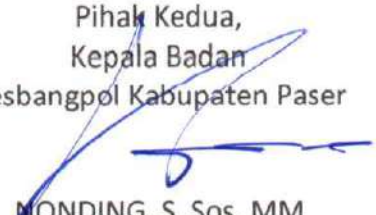
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemahaman di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Terlaksananya kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	2 Dokumen Dan 10 Kec
2.	Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Terlaksananya kebijakan teknis dan pemantapan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	2 Dokumen dan 300 Orang

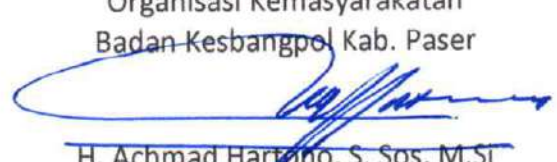
NO	KEGIATAN	TARGET
1	2	3
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Rp. 33.831.271.197
2.	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	Rp. 908.741.292
Total		Rp.34.740.012.489

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


M. NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607117031007

Pihak Pertama,
Kabid Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesbangpol Kab. Paser


H. Achmad Hartono, S. Sos, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19701012 199803 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DERI FITRIADI, ST**

Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **H. ACHMAD HARTONO, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kabid. Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

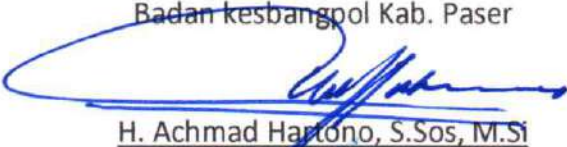
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan kesbangpol Kab. Paser


H. Achmad Hartono, S.Sos, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19701012 199803 1 008

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Deri Fitriadi, S.T
Penata Tk. I / III d
NIP. 19810703 200903 1 006

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 25.124.000
2.	Pnyusunan Bahan Perumusann Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 2.500.000
3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 1.025.396.300
4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp.32.195.483.997

5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rp. 563.794.400
	Total	Rp. 33.831.271.197

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan kesbangpol Kab. Paser

H. Achmad Hartono, S.Sos., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19701012 199803 1 008

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Deri Fitriadi, S.T
Penata Tk. I / W d
NIP. 19810703 200903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penyusunan Program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Dokumen Program Kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	2 Dokumen
2.	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	1 Dokumen
3.	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	2650 Orang

4.	Terlaksananya koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koodinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	400 Orang
5.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah.	3 Laporan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DERI FITRIADI, S.T**
Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
Selanjutnya disebut *pihak pertama*,


Nama : **H.ACHMAD HARTONO, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kabid.Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid. Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan kesbangpol Kab. Paser


H. Achmad Hartono, S.Sos., M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19701012 199803 1 008

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Deri Fitriadi, S.T
Penata Tk. I / III d
NIP. 19810703 200903 1 006

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 18.890.392
2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pember -dayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 17.224.000
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp. 242.473.000
4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pember -dayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 238.295.600
5.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan di Buidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas ,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.	Rp. 391.358.000
	Total	Rp. 908.741.292

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid.Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan
Badan kesbangpol Kab. Paser


H. Achmad Harsono, S.Sos., M.Si

Pembina / IV a

NIP. 19701012 199803 1 008

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Deri Fitriadi, S.T

Penata Tk. I / III d

NIP. 19810703 200903 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Dokumen Progtam Kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan diBidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah oDokumen Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	2 Dokumen
3	Terlaksananya kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	200 Orang
4	Terlaksananya koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	300 Orang
5.	Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah.	2 Laporanann



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMIRUDDIN, S.ST**

Jabatan : Kabid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **NONDING , S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

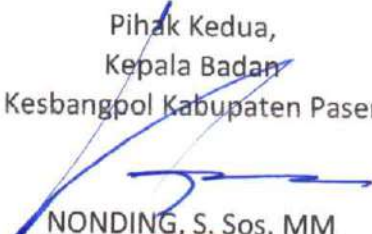
Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

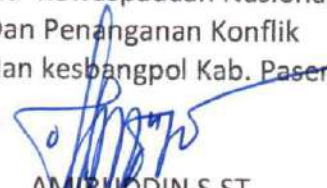
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607 11703 1007

Pihak Pertama,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser


AMIRUDDIN, S. ST
Pembina / IV a
NIP. 19670907 198811 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Jumlah Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan dini, monitoring, evaluasi dan pelaporan.	10 Kecamatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	3	4
1.	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	Rp. 1.764.614.380
	Total	Rp. 1.764.614.380

Tana Paser, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser


NONDING, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710607117031007

Pihak Pertama,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser


AMIRUDDIN, S. ST
Pembina / IV a
NIP. 19670907 198811 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NELSON PASARIBU, S.Sos**

Jabatan : JF Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **AMIRUDDIN, S.ST**

Jabatan : Kabid.Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser


AMIRUDDIN, S.ST

Pembina / IV a

NIP. 19670907 198811 1 001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


NELSON PASARIBU, S.Sos

Penata Tk I / III d

NIP. 19671021 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Terlaksamanya kegiatan peningkatan koordinasi dalam rangka penangan Konflik, deteksi dini, pengawasan orang Asing dan tenaga kerja asing serta penerbitan rekomendasi penelitian	23 Orang
2.	Peningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi kegiatan FKDM di Kecamatan	12 Orang
3.	Meningkatnya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Pelaporan Hasil pengawasan ATHG di wilayah Kabupaten Paser	4 Laporan

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini ,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , Serta Penanganan Konflik di Daerah.	Rp. 39.196.460
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini ,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , Serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 357.075.000

3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini ,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , Serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 289.950.000
	Total	Rp. 686.221.460

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser



AMRUDDIN, S.ST

Pembina / IV a

NIP. 19670907 198811 1 001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser



NELSON PASARIBU, S.Sos

Penata Tk I / III d

NIP. 19671021 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIRMAN, S.Sos**
Jabatan : JF. Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : **AMIRUDDIN, S.ST**
Jabatan : Kabid. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian dan penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser

AMIRUDDIN, S.ST

Pembina / IV a

NIP. 19670907 198811 1 001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser

Sudirman, S.Sos

Penata / III c

NIP. 19730102 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas Penyusunan Program dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program Kerja	2 Dokumen
2.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Kewapadaaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Bahan Perumusan Bahan Kebijakan	2 Dokumen
3.	Meningkatnya Koordinasi Pimpinan Daerah, Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi serta jumlah laporan hasil rapat rapat koordinasi dan konsultasi FORKOPIMDA	12 Dokumen

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1.	Penyusunan Program Kerja dibidang di Bidang Kewaspadaan Dini ,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , Serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp.39.196.460
2.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini ,Kerjasama Intelijen , Pemantauan Orang Asing , Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan , Serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 39.196.460

3.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah ,Kabupaten / Kota	Rp. 1.000.000.000
	Total	Rp. 1.078.392.920

Tana Paser, Januari 2024

Pihak Kedua,
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik
Badan kesbangpol Kab. Paser


AMIRUDDIN, S.ST

Pembina / IV a
NIP. 19670907 198811 1 001

Pihak Pertama,
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbangpol Kabupaten Paser


Sudirman, S.Sos

Penata / III c
NIP. 19730102 200604 1 010

Lampiran Rencana Aksi

Lampiran II

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Organisasi yang akuntabel	Nilai Akip dan SAKIP	BB					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN -TAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat	80%					
1.1	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		✓			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan		✓			Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		✓			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/Bln	✓	✓	✓		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	270 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket			✓		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	✓	✓			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	✓	✓			Tersedianya Bahan Logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	✓	✓	✓	✓	Tersedianya barang cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan - undangan yang disediakan	12 Dokumen				✓	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang Milik Daerah	2 Unit					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	✓		✓		Tersedianya Mebel

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	✓	✓	✓	✓	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	✓	✓	✓		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya	3 Unit			✓	✓	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit		✓			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
II	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Paser yang Responsif dan bertanggung jawab dalam proses dan partisipasi politik yang demokratis.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu	80%					
1.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	RATA - RATA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU	80%	✓	✓	✓	✓	

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokras , Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala d\Daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	10 Kecamatan	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	✓				Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	✓			✓	Tersusunnya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	1800 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Koordiniasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	400 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordiniasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	2 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembanggan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
III	Mewujudkan Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas	Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	75%					
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Organisasi Masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	✓	✓	✓	✓	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Jumlah Dokumen / Orang yang melaksanakan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	100%	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 Dokumen	✓			✓	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 Dokumen	✓	✓	✓		Tersusunnya kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	200 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	200 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	2 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah

IV	Mewujudkan Ketahanan ekonomi sosial Budaya dan Agama	Fasilitasi Kebijakan di Bidang Ekonomi , Sosial Budaya	90%					
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Presentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya yang di tindak lanjuti	90%	✓	✓	✓	✓	

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	

1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	90%	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5 Dokumen	✓	✓	✓		Tersusunnya Program Kerja dibidang Ketahanan Ekonomi ,Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
V	Meningkatkan Pemahaman Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat akan pemahaman idiologi pancasila	100%					
1	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase penurunan konflik yang berbau sara	6 Dokumen	✓	✓	✓	✓	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Terlaksananya Perumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	✓	✓	✓	✓	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
VI	Meningkatan Kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib dan aman	Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Paser						

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	

1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Kasus Konflik sosial yang tertangani / terselesaikan	100%	✓	✓	✓	✓	
1.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	100%	✓	✓	✓	✓	
	Penyusunan Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersusunnya Program Kerja di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Tersusunnya kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	23 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Orang	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
	Pelaksanaan Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Monitoring, Evalausi dan Pelaporan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN/SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TRIWULAN				RENCANA AKSI
				I	II	III	IV	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	12 Dokumen	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota



Kepala Badan
Kesbangpol Kabupaten Paser

(Handwritten signature)
 NONDING, S. Sos, MM
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 19710607 199703 1 007

Lampiran III

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
 Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023

Sasaran SKPD Tahunan :

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		8				32.351.024.068		0		32.351.024.068		1.250.346.919		3.673.945.238		3.136.134.652		23.397.888.623		31.458.315.432		31.458.315.432		97,24	
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			32.351.024.068		0		32.351.024.068		1.250.346.919		3.673.945.238		3.136.134.652		23.397.888.623		31.458.315.432		31.458.315.432		97,24	
1	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat ()	288	6.426.345.746	0	0	288	6.426.345.746	18	757.376.352	18	2.321.887.392	18	1.407.302.684	18	1.425.224.418	72	5.911.790.846	72	5.911.790.846	25	91,99	
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	500	44.300.000	0	0	100	44.300.000	0	0	3	17.478.200	6	25.575.100	1	0	10	43.053.300	10	43.053.300	2	97,19	
		8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0	14.300.000	5	0	0	14.300.000	2	0	2	2.300.000	1	12.000.000	0	0	5	14.300.000	10	14.300.000	10	100	
		8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan)	19	30.000.000	5	0	0	30.000.000	2	0	1	15.178.200	1	13.575.100	1	0	5	28.753.300	10	28.753.300	52,63	95,84	
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan yang ditindak lanjuti (%)	500	5.899.531.510	0	0	100	5.899.531.510	25	658.894.428	25	2.222.500.138	25	1.254.414.240	25	1.262.718.970	100	5.398.527.776	100	5.398.527.776	20	91,51	
		8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	35	5.483.785.369	35	0	35	5.483.785.369	93	582.308.620	93	2.073.842.930	93	1.167.872.568	93	1.159.208.874	93	4.983.232.992	64	4.983.232.992	182,86	90,87	
		8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.250	415.746.141	0	0	230	415.746.141	50	76.585.808	60	148.657.208	69	86.541.672	50	103.510.096	229	415.294.784	229	415.294.784	18,32	99,89	
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (%)	500	417.117.300	0	0	100	417.117.300	25	95.503.904	25	76.208.334	25	106.321.764	25	136.084.588	100	414.118.590	100	414.118.590	20	99,28	
		8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	700.800	0	0	1	700.800	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	16,67	0	
		8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	10	26.192.500	0	0	2	26.192.500	0	0	0	0	1	0	1	24.300.000	2	24.300.000	2	24.300.000	20	92,77	
		8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	10	61.259.200	0	0	2	61.259.200	1	30.179.300	1	16.079.900	0	0	0	14.999.600	2	61.258.800	2	61.258.800	20	100	
		8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	35.059.800	0	0	2	35.059.800	0	8.754.900	0	8.754.800	0	10.497.500	0	6.974.000	0	34.981.200	0	34.981.200	0	99,78	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	5.200.000	0	0	12	5.200.000	3	0	3	0	3	0	3	5.200.000	12	5.200.000	12	5.200.000	20	100	
		8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	288.705.000	0	0	120	288.705.000	30	56.569.704	40	51.373.634	30	95.824.264	20	84.610.988	120	288.378.590	120	288.378.590	20	99,89	
		8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah (Unit)	0	19.713.900	0	0	0	19.713.900	0	0	0	0	0	0	0	19.703.600	0	19.703.600	0	19.703.600	0	99,95	
		8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	12	19.713.900	0	0	2	19.713.900	0	0	0	0	0	0	2	19.703.600	2	19.703.600	2	19.703.600	16,67	99,95	
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	500	23.663.036	0	0	100	23.663.036	25	2.978.020	25	4.045.920	25	5.660.380	25	4.627.860	100	17.312.180	100	17.312.180	20	73,16	
		8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	60	6.429.800	0	0	12	6.429.800	3	370.000	3	1.500.000	3	3.000.000	3	1.550.000	12	6.420.000	12	6.420.000	20	99,85	
		8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	17.233.236	0	0	12	17.233.236	3	2.608.020	3	2.545.920	3	2.660.380	3	3.077.860	12	10.892.180	12	10.892.180	20	63,2	
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik negara yang terpelihara (%)	500	22.020.000	0	0	100	22.020.000	25	0	25	1.654.800	25	15.331.200	25	2.089.400	100	19.075.400	100	19.075.400	20	86,63	
		8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	17.760.000	0	0	3	17.760.000	0	0	0	0	2	12.731.200	1	2.089.400	3	14.820.600	3	14.820.600	20	83,45	
		8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	4.260.000	0	0	10	4.260.000	2	0	3	1.654.800	3	2.600.000	2	0	10	4.254.800	10	4.254.800	20	99,88	
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
		Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
		Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																							
		Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																							
2	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase penurunan konflik yang berbau sara (%)	500	1.980.439.500	0	0	100	1.980.439.500	25	149.842.943	25	91.806.786	25	740.171.450	25	990.043.301	100	1.971.864.480	100	1.971.864.480	20	99,57	
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Teknis dibidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (%)	400	1.980.439.500	0	0	75	1.980.439.500	15	149.842.943	20	91.806.786	20	740.171.450	20	990.043.301	75	1.971.864.480	75	1.971.864.480	18,75	99,57	
		8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	25	176.239.500	0	0	5	176.239.500	0	3.018.600	2	10.503.300	2	26.082.000	1	135.995.584	5	175.599.484	5	175.599.484	20	99,64	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
		8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembedaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	460	1.804.200.000	0	0	100	1.804.200.000	20	146.824.343	20	81.303.486	30	714.089.450	30	854.047.717	100	1.796.264.996	100	1.796.264.996	21,74	99,56	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																									
3	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (%)	400	20.029.431.772	0	0	80	20.029.431.772	20	85.771.200	20	758.985.184	20	184.998.005	20	18.967.033.805	80	19.996.788.194	80	19.996.788.194	20	99,84	
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan (Kecamatan)	50	20.029.431.772	0	0	10	20.029.431.772	2	85.771.200	3	758.985.184	3	184.998.005	2	18.967.033.805	10	19.996.788.194	10	19.996.788.194	20	99,84	
		8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1.000	292.730.400	0	0	1.000	292.730.400	200	27.565.000	300	55.192.265	300	168.728.700	200	35.978.485	1.000	287.464.450	1.000	287.464.450	100	98,2	
		8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	50	19.545.672.272	0	0	50	19.545.672.272	10	10.260.000	10	695.900.919	20	15.519.305	10	18.798.020.945	50	19.519.701.169	50	19.519.701.169	100	99,87	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	2	191.029.100	0	0	2	191.029.100	0	47.946.200	1	7.892.000	0	750.000	1	133.034.375	2	189.622.575	2	189.622.575	100	99,26	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																									
4	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif (%)	375	302.487.250	0	0	75	302.487.250	10	26.814.400	25	36.115.750	25	48.219.585	15	184.470.910	75	295.620.645	75	295.620.645	20	97,73	
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan (%)	375	302.487.250	0	0	75	302.487.250	10	26.814.400	25	36.115.750	25	48.219.585	15	184.470.910	75	295.620.645	75	295.620.645	20	97,73	
		8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	990	113.322.070	0	0	200	113.322.070	50	12.774.400	50	11.385.170	50	22.294.600	50	62.160.900	200	108.615.070	200	108.615.070	20,2	95,85	
		8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	1.140	36.244.780	0	0	300	36.244.780	75	5.610.000	75	7.594.580	75	3.668.185	75	18.583.700	300	35.456.465	300	35.456.465	26,32	97,83	
		8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	10	152.920.400	0	0	2	152.920.400	0	8.430.000	1	17.136.000	1	22.256.800	0	103.726.310	2	151.549.110	2	151.549.110	20	99,1	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6	Rp	7	Rp	8	Rp	9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	16
					Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																				
					Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																				
					Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																				
5	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase kebijakan bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti (%)	500	963.320.800	0	0	100	963.320.800	25	47.366.561	25	178.307.000	25	298.277.784	25	435.342.515	100	959.293.860	100	959.293.860	20	99,58	
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan budaya yang dirumuskan (%)	500	963.320.800	0	0	100	963.320.800	25	47.366.561	25	178.307.000	25	298.277.784	25	435.342.515	100	959.293.860	100	959.293.860	20	99,58	
		8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)	5	199.999.800	0	0	5	199.999.800	1	7.924.810	1	74.999.000	2	86.499.784	1	29.676.000	5	199.099.594	5	199.099.594	100	99,55	
		8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1.360	654.999.600	0	0	1.000	654.999.600	200	34.967.351	300	97.722.000	300	207.744.000	200	311.439.619	1.000	651.872.970	1.000	651.872.970	73,53	99,52	
		8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	26	108.321.400	0	0	10	108.321.400	2	4.474.400	3	5.586.000	3	4.034.000	2	94.226.896	10	108.321.296	10	108.321.296	38,46	100	
					Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																				
					Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																				
					Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																				
					Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
6	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan (%)	500	2.648.999.000	0	0	100	2.648.999.000	25	183.175.463	25	286.843.126	25	457.165.144	25	1.395.773.674	100	2.322.957.407	100	2.322.957.407	20	87,69	
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang dirumuskan (%)	500	2.648.999.000	0	0	100	2.648.999.000	25	183.175.463	25	286.843.126	25	457.165.144	25	1.395.773.674	100	2.322.957.407	100	2.322.957.407	20	87,69	
		8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	10	14.999.600	0	0	10	14.999.600	2	0	3	7.425.000	3	0	2	4.336.000	10	11.761.000	10	11.761.000	100	78,41	
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	2	144.999.600	0	0	2	144.999.600	0	0	1	3.560.000	1	1.850.000	0	138.432.880	2	143.842.880	2	143.842.880	100	99,2	
		8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	192	30.000.000	0	0	100	30.000.000	20	2.700.000	30	3.276.000	30	16.100.000	20	1.874.000	100	23.950.000	100	23.950.000	52,08	79,83	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	%	16
		8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	1.000	320.000.000	0	0	1.000	320.000.000	200	11.155.350	300	22.396.000	300	48.475.200	200	216.986.722	1.000	299.013.272	1.000	299.013.272	100	93,44	
		8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	116	489.000.000	0	0	100	489.000.000	20	4.925.000	30	125.190.555	30	109.677.479	20	223.645.600	100	463.438.634	100	463.438.634	86,21	94,77	
		8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	68	1.649.999.800	0	0	20	1.649.999.800	5	164.395.113	5	124.995.571	5	281.062.465	5	810.498.472	20	1.380.951.621	20	1.380.951.621	29,41	83,69	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya :																									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023 (%)		Ket
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15=14/6 x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				JUMLAH		32.351.024.068		0		32.351.024.068		1.250.346.919		3.673.945.238		3.136.134.652		23.397.888.623		31.458.315.432		31.458.315.432			
				Rata-rata capaian kinerja (%)															100	97,24			20	97,24	
				Predikat kinerja															Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat tinggi	

Disusun

Tanah Grogot,

Nonding, S.Sos. MM

Pembina Tingkat I
NIP. 197106071997031007

Dievaluasi

Tanah Grogot,
Kepala Bappedalitbang

NIP.

Lampiran IV

**DAFTAR PRESTASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER**

NO.	URAIAN	PREDIKAT
1.	Penghargaan Gubernur Provinsi Kaltim : Panji Keberhasilan Bidang Koondusifitas Daerah Tahun 2024	1 2
2.	Penghargaan Gubernur Provinsi Kaltim Panji Keberhasilan Bidang Hubungan Antar Umat Beragama Tahun 2024	3
3.	Penghargaan Gubernur Provinsi Kaltim Panji Keberhasilan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah Gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Ferkusor Narkotika (P4GN) Tahun 2024	



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan

Kepada :

**KABUPATEN PASER
TERBAIK I**

BIDANG KONDUSIFITAS DAERAH
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 67
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 09 Januari 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan

Kepada :

KABUPATEN PASER
TERBAIK II

BIDANG HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 67
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 09 Januari 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan

Kepada :

KABUPATEN PASER
TERBAIK III

BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) KABUPATEN
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 67
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 09 Januari 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan


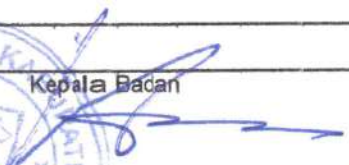
Kepada :
KABUPATEN PASER
TERBAIK III

BIDANG KONDUSIFITAS DAERAH
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KE 66

Samarinda, 09 Januari 2023
Gubernur Kalimantan Timur


















Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

PEMERINTAH KABUPATEN PASER	Nomor SOP	052/07/BKBP-PP/2023
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Badan NONDING, S.Sos, M.M NIP.19710607 1999703 1 007
KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM	Nama SOP	Evaluasi Kinerja
Dasar Hukum	Kompetensi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Penyusunan Standar Operasional Prosedur Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah 7. Peraturan Bupati Paser Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser Kabupaten Paser 	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser</p> <p>Memiliki kemampuan dalam menyusun evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser</p>	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan/sarana prasarana dan fasilitas	
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser SOP pelaksanaan rapat SOP pengadaan barang dan jasa SOP pengarsipan	Renstra Badan Renja Badan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses evaluasi Kinerja ini tidak akan berjalan lancar	Rumusan rencana program dan kegiatan target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran	

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA			Mutu Baku			Ket.
		Penyusun bahan laporan	Ka. Sub Bag Program	Sekretaris Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi Kepala untuk penyusunan LKJIP				Surat Edaran Sekda	5 menit	Surat Edaran yang telah didisposisi	
2	Menghimpun laporan kegiatan dari bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan LKJIP				Surat Edaran yang telah didisposisi	120 menit	Infcrmasi ke PPTK	
3	Menerima, laporan kegiatan dari bidang-bidang dan sekretariat serta mengolah data				Informasi ke Bidang	2 hari	Laporan Kegiatan	
4	Memverifikasi, dan menganalisis data (menyusun draf LKJIP)				Laporan Kegiatan	14 hari	Draf LAKIP	
5	Konsultasi dan menyampaikan draf LKJIP				Draf LAKIP	120 menit	Draf LAKIP	
6	Menyusun Draf akhir LKJIP dan memberi paraf				Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP	
7	Meneliti dan memaraf				Draf LAKIP	120 menit	Draf LAKIP yang sudah diparaf	
8	Menandatangani LKJIP				Draf LAKIP yang sudah diparaf	30 menit	LAKIP yang telah ditandatangani	
9	Menyerahkan LKJIP				Draf LAKIP yang sudah diparaf	3 menit	LAKIP yang telah ditandatangani	
10	Menerima LKJIP yang sudah ditandatangani Kepala, digandakan, diarsip dan dikirimkan ke instansi terkait				LAKIP yang telah ditandatangani	180 menit	LAKIP telah digandakan dan siap dikirim ke instansi terkait	

<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN PASER</p> <p align="center">BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> 	Nomor SOP	052 / 05 / BKBP-PK/ 2023
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 Kepala Badan WONDING S. Sos. M.M NIP.19710607 1999703 1 007
<p align="center">KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM</p>	Nama SOP	Pengumpulan dan Penyusunan Data Kinerja
Dasar Hukum	Kompetensi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 4. Peraturan Bupati Paser Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser 	Memiliki kewenangan dalam pengumpulan dan penyusunan data kinerja	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan/sarana prasarana dan fasilitas	
SOP Penyusunan Renstra SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan SOP Penyusunan Lakip	Renstra Dinas Laporan Realisasi Anggaran Perangkat Komputer ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengumpulan dan penyusunan data kinerja ini tidak akan berjalan lancar		

Prosedur Pengumpulan dan Penyusunan Data Kinerja

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		Kasubbag Perencanaan	Pelaksana	Bidang	Tim	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memerintahkan mengumpulkan data kinerja							Data	1 Jam	Data	
2	Mengumpulkan data kinerja pada masing-masing bidang							Data	1 Minggu	Data	
3	Mengolah data kinerja							Data	1 Hari	Draf	
4	Melaksanakan rapat intern dengan tim							Draf	1 Minggu	Draf	
5	Menyusun data kinerja							Draf	1 Hari	Data Kinerja	
6	Memaraf dan menandatangani data kinerja							Data Kinerja	1 Hari	Data Kinerja	
7	Menggandakan data kinerja							Data Kinerja	1 Jam	Data Kinerja	
8	Mengarsipkan dan mengirim data kinerja							Data Kinerja	1 Jam	Data Kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gedung F Lantai 2
Desa Tepian Batang Tanah Grogot, Kabupaten Paser
Kode Pos 76211, Email : kesbangpol_paser@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

NOMOR : 052 / 005 / BKBP-PK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2023 Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023,.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Bupati Paser Nomer 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser pada Tahun 2023 dengan semua keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

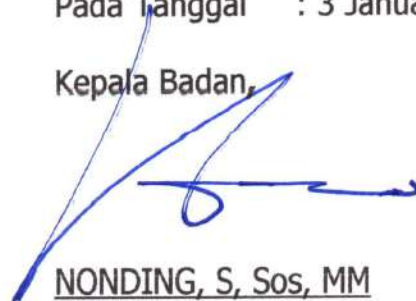
- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusun Laporan Kinerja;
- b. Menyusun dokumen perencanaan strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Cascading (pohon kinerja), Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Individu dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengukuran dan penyusunan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser
- d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil Penyusunan Laporan kinerja.

- e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil Penyusunan Laporan Kinerja kepada Kepala Badan.

- KETIGA : Rincian tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- KEEMPAT : Lampiran keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Badan,



NONDING, S, Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser di Tana Paser
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

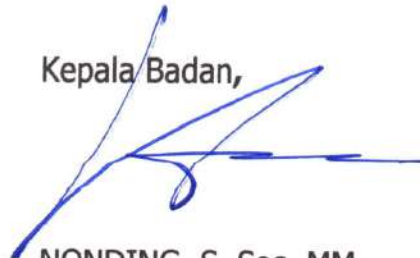
Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 052/005 /BKBP-PK/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Kepala Badan
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : JF. Perencana Muda
Anggota :

1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Agama
3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik
4. Kasub bag. Umum dan Kepegawaian
5. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
6. Pelaksana

Kepala Badan,



NONDING, S, Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : 052/005/BKBP-PK/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PASER TAHUN 2022

1. Penanggung Jawab : Bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Ketua : Bertugas menyarankan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Penyusunan Laporan kinerja.
3. Sekretaris : Bertugas :
 - a. Menyusun jadwal penyusunan hasil Laporan kinerja.
 - b. Membentuk Ketua Tim dalam Kegiatan Penyusunan laporan kinerja.
 - c. Membantu Ketua Tim dalam membuat dan Menyusun laporan kinerja.
4. Anggota : Bertugas :
 - a. Menyusun pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD
 - b. Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan SKPD.
 - c. Menganalisa data Laporan kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya.
 - d. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi.
 - c. Menyusun dokumen Laporan kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan.

- d. Menyusun dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah SKPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

Kepala Badan,

NONDING, S, Sos, MM
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19710607 199703 1 007